



djp

LAPORAN KINERJA



KPP PRATAMA
BANDUNG BOJONAGARA



2024

(022) 2006520
kpp.428@pajak.go.id



KATA PENGANTAR

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara pada tahun anggaran 2024, KPP Pratama Bandung Bojonagara menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024.

Laporan Kinerja KPP Pratama Bandung Bojonagara disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada KPP Pratama Bandung Bojonagara. Tujuannya adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan, sebagai alat ukur kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus menjadi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas KPP Pratama Bandung Bojonagara pada tahun 2024.

Bandung, 24 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Tb. Sofiuddin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Sistematika Laporan	7
BAB II Perencanaan Kinerja.....	8
A. Perencanaan Strategis.....	8
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	9
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	19
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20
D. Kinerja Lain-Lain	23
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	23
BAB IV Penutup	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 KPP Pratama Bandung Bojonagara. Laporan kinerja tahun 2024 ini diperlukan agar *stakeholder* maupun organisasi dapat memantau dan mengevaluasi terkait dengan kinerja KPP Pratama Bandung Bojonagara secara keseluruhan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkesinambungan.

Berbagai tantangan datang silih berganti selama tahun 2024. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat KPP Pratama Bandung Bojonagar gentar dalam mendukung tercapainya sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, dan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien. Dengan didukung oleh segenap SDM yang optimal, KPP Pratama Bandung Bojonagara terus berbenah dan bertumbuh menjadi mitra terpercaya Wajib Pajak dalam memenuhi segala kebutuhan perpajakan.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas:

- a. pelayanan pajak;
- b. penyuluhan pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- e. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;

- f. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- g. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- h. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
- i. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- j. pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- k. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- l. pemeriksaan pajak;
- m. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- n. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- o. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- p. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
- q. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- r. pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak;
- s. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- t. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- u. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan pelaksanaan administrasi kantor.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:

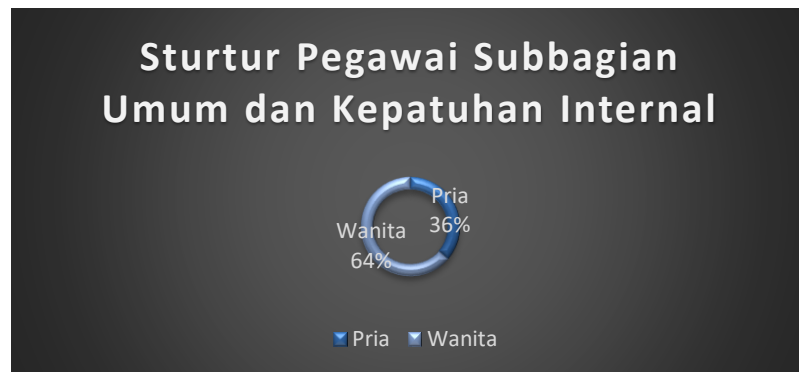
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang pajak;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak;
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-146/PJ/2021 tanggal 15 April tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara telah disusun dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Dipimpin oleh bapak Tb. Sofiuddin sebagai Kepala Kantor, berikut adalah susunan organisasi KPP Pratama Bandung Bojonagara:

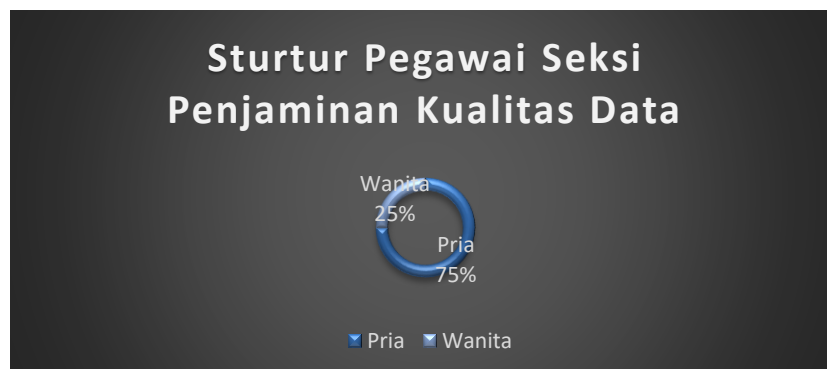
a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal terdiri dari 11 pegawai dengan 1 kepala seksi, 1 sekretaris, 1 bendahara, dan 8 pelaksana. Dari jumlah tersebut, terdapat 7 pegawai wanita dan 4 pegawai pria.



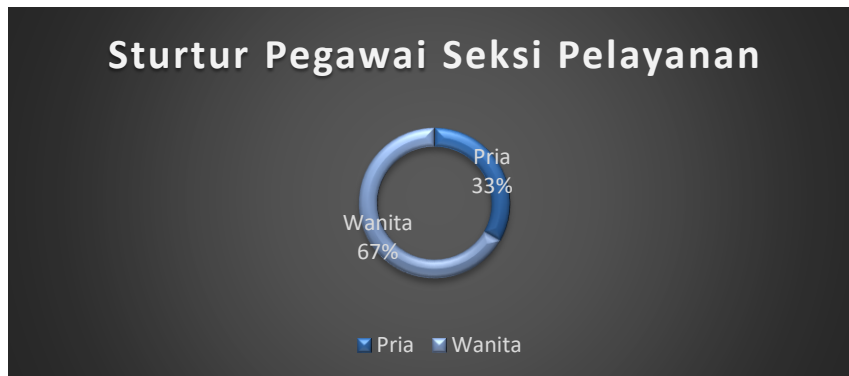
b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;

Seksi Penjaminan Kualitas Data terdiri dari 4 pegawai dengan 1 kepala seksi dan 3 pelaksana. Dari jumlah tersebut, terdapat 1 pegawai wanita dan 3 pegawai pria.



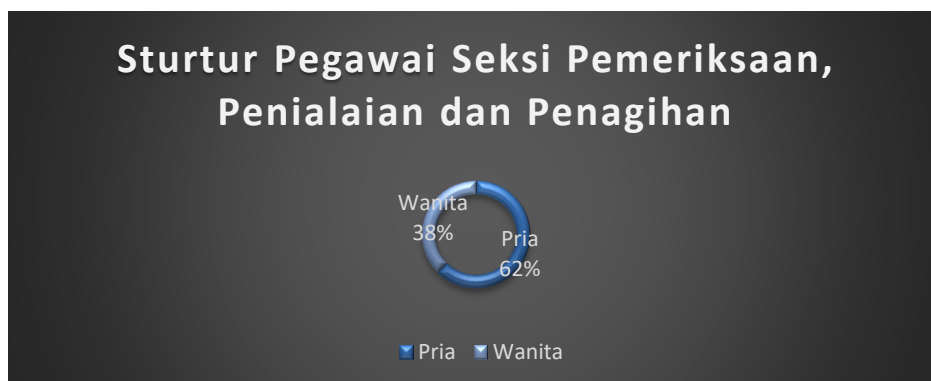
c. Seksi Pelayanan;

Seksi Penjaminan Kualitas Data terdiri dari 15 pegawai dengan 1 kepala seksi, 5 fungsional penyuluh, dan 9 pelaksana. Dari jumlah tersebut, terdapat 10 pegawai wanita dan 5 pegawai pria.



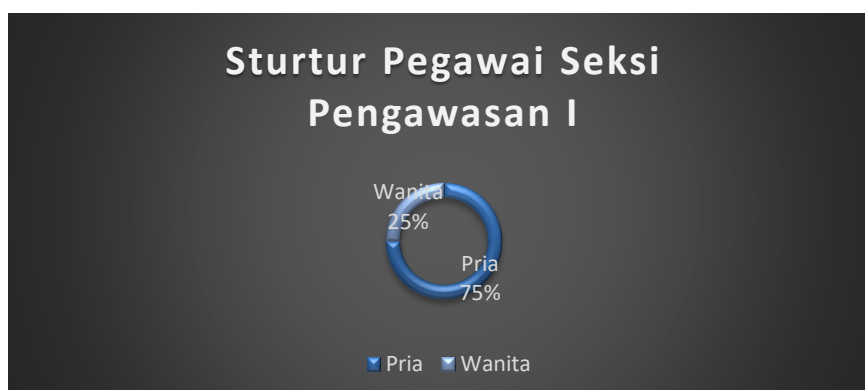
d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;

Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan terdiri dari 8 pegawai dengan 1 kepala seksi, 2 juru sita, dan 5 pelaksana. Dari jumlah tersebut, terdapat 3 pegawai wanita dan 5 pegawai pria.



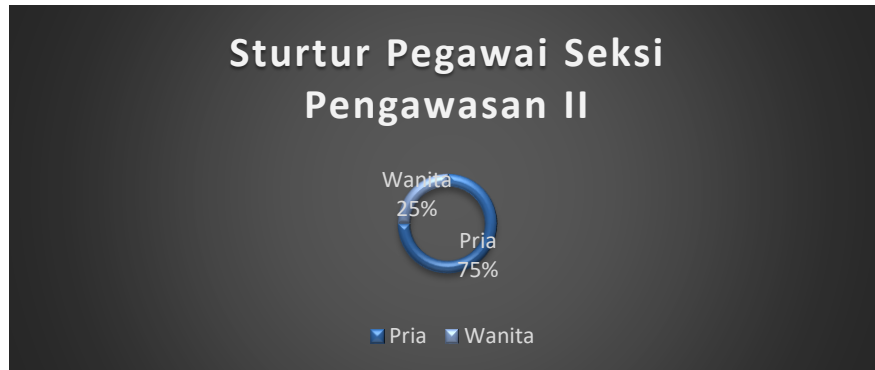
e. Seksi Pengawasan I;

Seksi Pengawasan I terdiri dari 8 pegawai dengan 1 kepala seksi, 6 *account representative*, dan 1 pelaksana. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 pegawai wanita dan 6 pegawai pria.



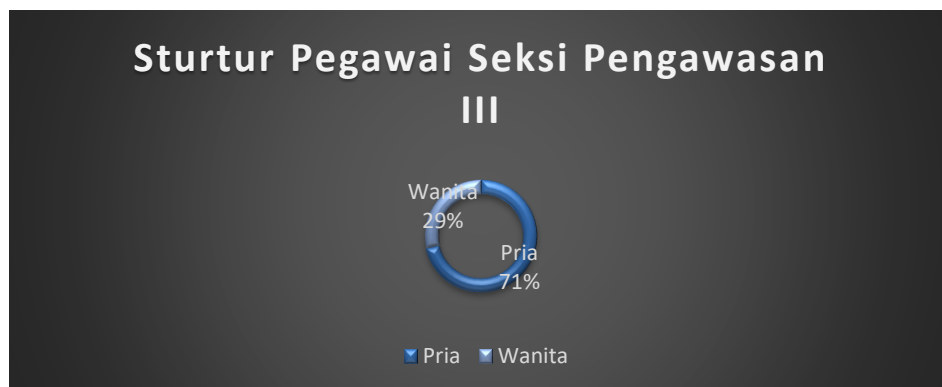
f. Seksi Pengawasan II;

Seksi Pengawasan II terdiri dari 8 pegawai dengan 1 kepala seksi, dan 7 *account representative*. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 pegawai wanita dan 6 pegawai pria.



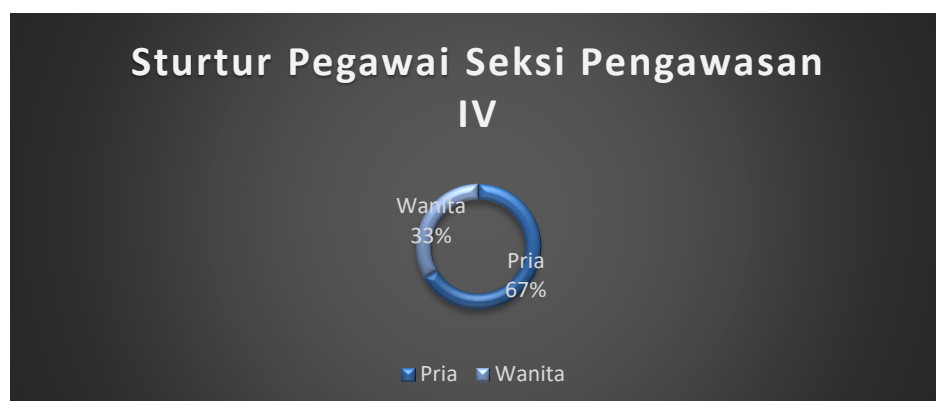
g. Seksi Pengawasan III;

Seksi Pengawasan III terdiri dari 7 pegawai dengan 1 kepala seksi, dan 6 *account representative*. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 pegawai wanita dan 5 pegawai pria.



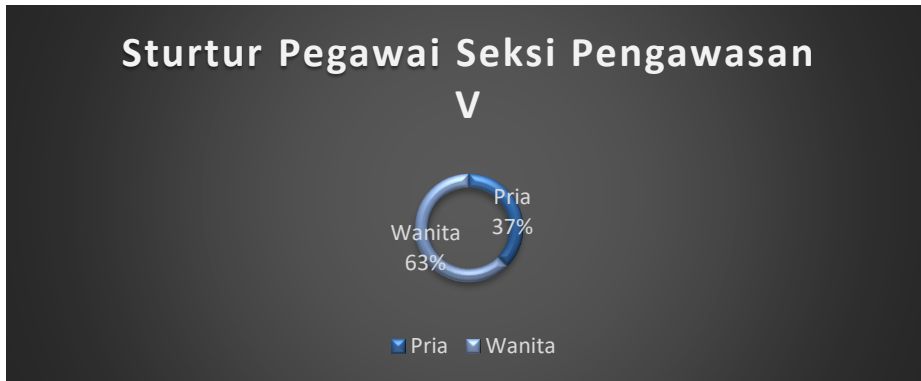
h. Seksi Pengawasan IV;

Seksi Pengawasan IV terdiri dari 9 pegawai dengan 1 kepala seksi, 7 *account representative*, dan 1 pelaksana. Dari jumlah tersebut, terdapat 3 pegawai wanita dan 6 pegawai pria.



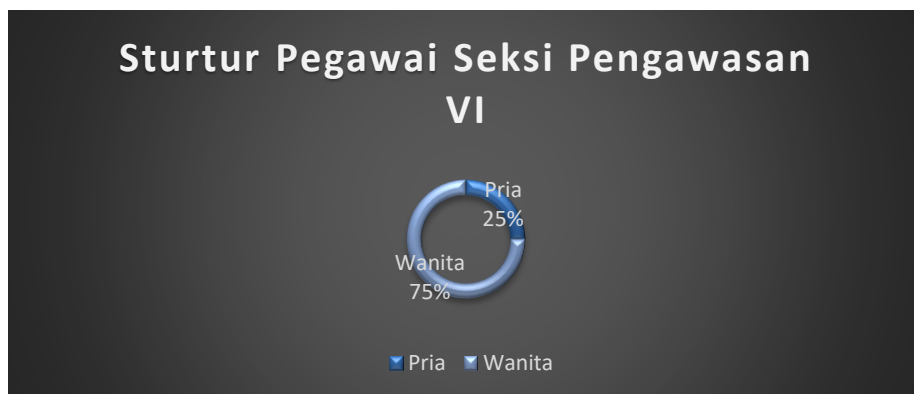
i. Seksi Pengawasan V;

Seksi Pengawasan V terdiri dari 8 pegawai dengan 1 kepala seksi, 6 *account representative*, dan 1 pelaksana. Dari jumlah tersebut, terdapat 5 pegawai wanita dan 3 pegawai pria.



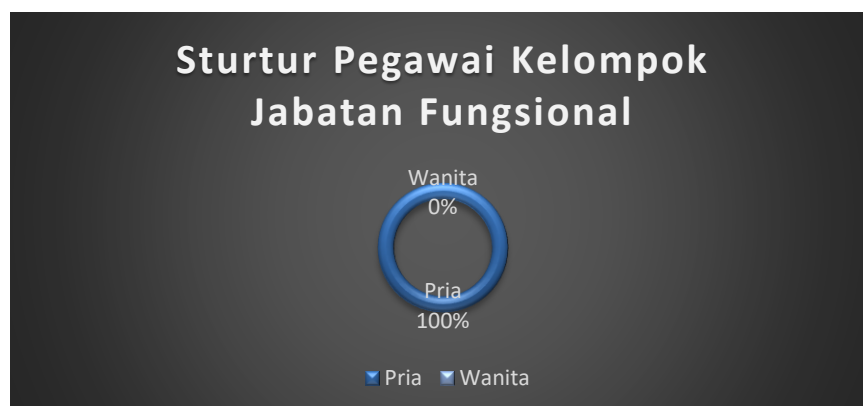
j. Seksi Pengawasan VI;

Seksi Pengawasan VI terdiri dari 8 pegawai dengan 1 kepala seksi, 6 *account representative*, dan 1 pelaksana. Dari jumlah tersebut, terdapat 6 pegawai wanita dan 2 pegawai pria.



k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari 13 pegawai dengan 2 Supervisor dan 11 Pemeriksa Pajak. Dari jumlah tersebut merupakan pegawai pria.



C. Sistematika Laporan.

Sistematika Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Bandung Bojonagara disusun sesuai dengan lampiran ND-8/PJ/2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan urutan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan penjelasan secara umum mengenai organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini diuraikan ringkasan mengenai perencanaan strategis dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini diuraikan ringkasan mengenai pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

4. Bab IV Penutup

Pada bagian ini diuraikan simpulan umum atas kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan pada masa mendatang untuk terus meningkatkan kinerja KPP Pratama Bandung Bojonagara.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Renstra DJP 2020-2024 disusun berdasarkan keputusan KEP-389/PJ/2020 dan menjadi acuan dalam penyusunan peta strategi, rencana kerja tahunan (Renja), serta rencana strategis unit Eselon III. Amanat Utama dalam Renstra DJP 2020-2024 yaitu:

1. Visi dan Misi DJP:

Visi: Penguatan administrasi perpajakan untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Misi: Optimalisasi penerimaan pajak, digitalisasi perpajakan, serta penguatan kepatuhan dan penegakan hukum perpajakan.

2. Tujuan Strategis:

- a. Meningkatkan tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
- b. Memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.
- d. Mengembangkan sistem administrasi pajak yang modern berbasis digital.

Renstra DJP selaras dengan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya dalam agenda memperkuat ketahanan ekonomi. DJP berkontribusi pada dalam aspek:

1. Reformasi Fiskal

Dalam reformasi fiskal, DJP berkontribusi dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax System) untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Selain itu, DJP juga tetap melakukan optimalisasi kebijakan fiskal yang lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan global.

2. Iklim Investasi dan Kemudahan Usaha

Pada aspek ini, DJP melakukan penyederhanaan peraturan perpajakan melalui Omnibus Law Pajak yang mencakup PPh, PPN, dan retribusi daerah. Dengan berkembangnya tantangan global, DJP juga terus melakukan fasilitasi kepastian dan perpajakan untuk menarik investasi.

3. Digitalisasi Perpajakan

Pengembangan Taxpayer Account yang terintegrasi terus dikembangkan dan diperbaiki untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penggunaan big data dan

teknologi informasi juga terus didorong demi analisis kepatuhan perpajakan yang lebih akurat.

Sebagai bagian dari perencanaan tahunan, RKA Tahun 2024 KPP Pratama Bandung Bojonagara diarahkan untuk mendukung pencapaian target strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra DJP. Demi tercapainya hal tersebut, fokus RKA 2024 KPP Pratama Bandung Bojonagara terdapat pada:

1. Optimalisasi Penerimaan Negara

Target persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 100% dari target demi mendukung tercapainya proyeksi penerimaan APBN. Hal ini dilakukan dengan peningkatan efektivitas pengawasan dan penagihan.

2. Transformasi Digital Perpajakan

Mempersiapkan segenap jajaran KPP Pratama Bandung Bojonagara dalam rencana implementasi penuh sistem administrasi perpajakan terintegrasi (Core Tax Administration System) yang akhirnya di *launching* pada awal tahun 2025.

3. Peningkatan Pengawasan dan Tata Kelola Internal

Meningkatkan indeks persepsi integritas pegawai ditargetkan mencapai 90/100. Hal ini dapat dilakukan dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal minimal sebesar 90%. Dengan begitu, kami dapat secara bersama-sama menjaga tata kelola dan kepatuhan internal.

4. Dukungan terhadap Kebijakan Fiskal dan APBN

Penerapan kebijakan penggunaan anggaran DIPA yang optimal dengan tetap mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), KPP Pratama Bandung Bojonagara telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 (Renstra DJP) dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Penyusunan PK ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pencapaian target penerimaan pajak, serta mengoptimalkan peran KPP Pratama Bandung Bojonagara dalam mendukung keberhasilan reformasi perpajakan.

Sebagai unit operasional, KPP Pratama Bandung Bojonagara memastikan bahwa PK Tahun 2024 mengakomodasi amanat dalam Renstra DJP dan selaras dengan informasi tematik APBN Tahun 2024, terutama dalam aspek optimalisasi penerimaan negara, digitalisasi perpajakan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penyusunan PK di KPP Pratama Bandung Bojonagara dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh DJP, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi

KPP Pratama Bandung Bojonagara melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dan Direktorat terkait dalam penyusunan target kinerja. Selain berkoordinasi, KPP Pratama Bandung Bojonagara juga menyesuaikan sasaran strategis dengan indikator dalam Renstra DJP 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024.

2. Evaluasi Capaian Tahun Sebelumnya

KPP Pratama Bandung Bojonagara melakukan evaluasi terkait capaian target penerimaan pajak tahun 2023 sebagai dasar perencanaan 2024. Dari hasil evaluasi tersebut, PK 2024 dibuat dengan menyesuaikan strategi pengawasan dan kepatuhan berdasarkan hasil evaluasi.

3. Penetapan Target Kinerja Tahun 2024

Target Kinerja tahun 2024 dibuat dengan menyusun target Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai arahan pusat dan kebutuhan operasional KPP Pratama Bandung Bojonagara. Dalam hal ini penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan target kinerja.

4. Finalisasi dan Penandatanganan PK

Tahap akhir dari proses ini yaitu dengan dilakukannya penandatanganan PK oleh Kepala KPP Pratama Bandung Bojonagara dan disampaikan kepada Kanwil serta DJP pusat untuk validasi dan monitoring.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara mencakup sasaran strategis yang sejalan dengan amanat Renstra DJP. Adapun sasaran utama PK 2024 meliputi:

1. Optimalisasi Penerimaan Pajak

Target penerimaan pajak disesuaikan dengan proyeksi APBN (100% dari target yang ditetapkan DJP). Hal ini dapat dicapai dengan implementasi strategi ekstensifikasi

dan intensifikasi, termasuk penggalian potensi pajak berbasis data dan penguatan pengawasan kepatuhan.

2. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Target rasio kepatuhan formal dan material ditargetkan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan efektivitas pengawasan berbasis risiko dengan dukungan teknologi analitik diharapkan mampu untuk mendukung terciptanya peningkatan rasio kepatuhan.

3. Penguatan Tata Kelola Organisasi dan SDM

KPP Pratama Bandung Bojonagara menargetkan indeks persepsi integritas pegawai sejalan dengan DJP yaitu dengan ditargetkan $\geq 90/100$. Hal ini dapat dicapai dengan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan internal minimal 90%.

Sebagai bentuk pengukuran pencapaian PK, berikut adalah beberapa IKU yang menjadi fokus KPP Tahun 2024:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 100%;
2. Peningkatan rasio kepatuhan formal WP;
3. Meningkatkan Indeks Penilaian Integritas Unit diatas 100%;
4. Peningkatan Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan diatas 100%.

KPP Pratama Bandung Bojonagara berkomitmen untuk menjalankan PK Tahun 2024 secara optimal guna mendukung pencapaian target nasional dan memperkuat peran DJP dalam perekonomian negara.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai bagian dari komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, KPP Pratama Bandung Bojonagara senantiasa mengoptimalkan strategi pelaksanaan tugas dan fungsi perpajakan sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (Renstra DJP) 2020-2024. Evaluasi terhadap capaian kinerja ini dilakukan secara berkala guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan serta efisiensi dalam penghimpunan penerimaan negara. Secara ringkas, capaian nilai kinerja organisasi KPP Pratama tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective								30,00%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							103,09
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,63%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,63
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,47	Max	P/L	19,00%	42,22%	106,47
Customer Perspective								20,00%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,17
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,64%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,64
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	106,63%	Max	P/L	19,00%	42,22%	106,63
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,56
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,56%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,56
Internal Process Perspective								25,00%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,32
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,63%	Max	E/M	21,00%	50,00%	110,63
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,58
6a-CP	Persentase penyelesaian pemintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,74%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,74
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	111,89%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	71,17%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective								25,00%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							110,55
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebtinalan SDM	100,00	117,34	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,34
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,05	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,47
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	94,38	Max	P/M	14,00%	33,33%	104,86
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,50

Capaian kinerja organisasi ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan dalam beberapa aspek melampaui ekspektasi yang dirancang pada awal tahun. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kombinasi strategi yang matang, penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat, serta optimalisasi teknologi dalam administrasi perpajakan.

Sebagai bagian dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (Renstra DJP) 2020-2024, KPP Pratama telah berupaya meningkatkan efektivitas operasional, memperkuat pengawasan berbasis risiko, serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai sejauh mana pencapaian kinerja organisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun, berikut disajikan data perbandingan dari masing-masing IKU yaitu:

KPP Pratama Bandung Bojonagara		Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (1a-CP) (Persentase realisasi penerimaan pajak)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	65%	65%	100%	100%	
Realisasi	23,03%	49,06%	49,06%	69,87%	69,87%	100,63%	100,63%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	107,49%	107,49%	100,63%	100,63%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara		Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (1b-CP) (Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	
Realisasi	104,32%	109,87%	109,87%	109,96%	109,96%	106,47%	106,47%	
Capaian	104,32%	109,87%	109,87%	109,96%	109,96%	106,47%	106,47%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara		Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (2a-CP) (Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM))						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15%	100%	100%	65%	65%	100%	100%	
Realisasi	23,67%	100,64%	100,64%	72,24%	72,24%	100,64%	100,64%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	111,14%	111,14%	100,64%	100,64%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara		Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (2b-CP) (Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	60%	100%	100%	90%	90%	100%	100%	
Realisasi	95,61%	106,63%	106,63%	107,54%	107,54%	106,63%	106,63%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	119,49%	119,49%	106,63%	106,63%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara		Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (3a-CP) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	18,88%	100,56%	100,56%	53,13%	53,13%	100,56%	100,56%	
Capaian	75,51%	75,64%	75,64%	70,84%	70,84%	100,56%	100,56%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara	4 Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							
	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10,00%	74,00%	74,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%	
Realisasi	8,22%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%	
Capaian	82,20%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara	4 Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							
	4b-N Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	5,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	85,00%	100,00%	
Realisasi	6,22%	110,63%	110,63%	110,63%	110,63%	92,63%	110,63%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	108,98%	110,63%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
	(5a-CP) (Persentase pengawasan pembayaran masa)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Realisasi	N/A	120,00%	120,00%	111,43%	111,43%	120%	120%	
Capaian	N/A	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	120%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	(6a-CP) (Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	N/A	120,00%	120,00%	116,69%	116,69%	120%	120%	
Capaian	N/A	120,00%	120,00%	116,69%	116,69%	120%	120%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	(6b-N) Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	N/A	107,52%	107,52%	111,82%	111,82%	120,00%	120,00%	
Capaian	N/A	113,04%	113,04%	111,82%	111,82%	120,00%	120,00%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	(6c-N) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120,00%	118,74%	118,74%	84,00%	84,00%	118,74%	118,74%	
Capaian	120,00%	111,56%	111,56%	84,00%	84,00%	118,74%	118,74%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara	Penegakan hukum yang efektif							
	(7a-CP) Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	117,44%	120,00%	120,00%	112,55%	112,55%	120%	120%	
Capaian	117,44%	120,00%	120,00%	112,55%	112,55%	120%	120%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara	Penegakan hukum yang efektif							
	(7b-CP) Tingkat efektivitas penagihan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15%	75%	75%	45%	45%	75%	75%	
Realisasi	33,52%	111,89%	111,89%	108,81%	108,81%	111,89%	111,89%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara	Penegakan hukum yang efektif							
	(7c-N) Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	N/A	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	
Capaian	N/A	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara	Data dan Informasi yang berkualitas							
	(8a-CP) Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20%	100%	100%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	35,70%	120,00%	120,00%	124,78%	124,78%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara	Data dan Informasi yang berkualitas							
	(8b-CP) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10,00%	55,00%	55,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%	
Realisasi	46,67%	71,17%	71,17%	52,67%	52,67%	71,17%	71,17%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	(9a-N) Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Maximize/Take Last Known Value
Realisasi	107,00%	105,75%	105,75%	113,42%	113,42%	117,34%	117,34%	
Capaian	107,00%	105,75%	105,75%	113,42%	113,42%	117,34%	117,34%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	(9b-N) Indeks Penilaian Integritas Unit							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00%	85,00%	
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	93,05%	93,05%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	109,47%	109,47%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	(9c-N) Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	23,00%	70%	70,00%	70,00%	70,00%	90,00%	90,00%	
Realisasi	23,57%	73%	72,78%	72,78%	72,78%	94,38%	94,38%	
Capaian	102,48%	103,97%	103,97%	103,97%	103,97%	104,86%	104,86%	

KPP Pratama Bandung Bojonagara	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	(10a-CP) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120,00%	101,40%	101,40%	100,48%	100,48%	120%	120%	
Capaian	120,00%	101,40%	101,40%	100,48%	100,48%	120%	120%	

Dalam rangka memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, KPP Pratama Bandung Bojonagara telah melakukan berbagai upaya extra effort guna mengoptimalkan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat tata kelola administrasi perpajakan. Upaya-upaya ini tidak hanya berfokus pada pencapaian angka target, tetapi juga pada peningkatan kualitas

pelayanan, efektivitas pengawasan, dan inovasi dalam proses administrasi perpajakan.

Berikut adalah beberapa extra effort utama yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara dalam pencapaian target kinerja tahun 2024:

1. Meningkatkan kualitas SP2DK yang diterbitkan berdasarkan data pemicu maupun data penguji dan melalui analisis komprehensif untuk para WP strategis;
2. Optimalisasi pengawasan PPM melalui pengiriman himbauan atas penurunan atau WP yang tidak melakukan pembayaran rutin secara massal;
3. Mengoptimalkan realisasi PKM untuk para wajib pajak;
4. Melakukan pengawasan kepada 100 Wajib Pajak Besar di tiap seksi kewilayahan dan untuk seluruh WP strategis;
5. Melakukan analisis data untuk penggalan potensi;
6. Melakukan penerbitan SP2DK atas data pemicu terbesar;
7. Membuat tabel pengawasan tindak lanjut WP yang tidak setor atau kurang setor PPh Pasal 25 dan jenis pajak rutin lainnya;
8. Bekerja sama dengan pemberi kerja dan aparat Kelurahan untuk mengingatkan pelaporan SPT Tahunan;
9. Menerima layanan EFIN melalui whatsapp dan e-mail;
10. Menerima layanan konsultasi SPT Tahunan melalui whatsapp;
11. Membuat layanan *chat* otomatis berbasis whatsapp untuk mempermudah wajib pajak;
12. Mengadakan Kelas Pajak Online;
13. Membuat video penyampaian SPT Tahunan tokoh panutan/public figure;
14. Melakukan penyuluhan pajak secara tatap muka maupun daring (*live* instagram, kelas pajak, dll);
15. Melakukan undangan terbuka kelas pajak melalui sosial media kantor;
16. Melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan;
17. Menghubungi WP untuk segera merespon SP2DK dan menyelesaikan SP2DK Triwulan I baik DPP dan non DPP/Outstanding;
18. Melakukan visit ke lokasi usaha Wajib Pajak;
19. Mempersiapkan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan dengan baik dan tepat waktu;
20. Koordinasi dengan KPP se-Bandung terkait progres penerimaan data ILAP;

21. Melakukan pengecekan daftar nominatif atas pemenuhan persyaratan kenaikan jenjang dan jabatan pejabat fungsional;
22. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian kenaikan peringkat dan jabatan serta Assessment Center;
23. Melaksanakan mitigasi risiko dengan akurat dan tepat waktu;
24. Senantiasa melakukan pemantauan pengisian survey kinerja;
25. Memastikan data yang akan diinput pada aplikasi SAKTI (pembayaran gaji, tunjangan, pengembalian pajak, pembayaran lainnya) sudah sesuai dengan data sebenarnya;
26. Melakukan pergeseran anggaran untuk menutup pos yang kekurangan anggaran.

Dalam rangka memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi perpajakan, KPP Pratama Bandung Bojonagara telah menyusun rencana aksi ke depan yang berfokus pada optimalisasi penerimaan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, implementasi reformasi perpajakan berbasis digital, dan pengelolaan anggaran yang tepat dan handal. Adapun rencana aksi ke depan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan WP 200 besar masing-masing seksi dan AR;
2. Mengintensifkan pengawasan pembayaran masa (PPM) dan penelitian data pemicu/penguji (PKM) khususnya data keuangan EOI dan Penyandingan antara data EOI Rekening Keuangan (Inbound) dengan penghasilan Luar Negeri;
3. Mengintensifkan pengawasan pembayaran masa (PPM) ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK dan pengiriman klarifikasi atas penurunan pembayaran;
4. Melakukan pemanfaatan data pemicu dan penguji dengan disertai analisis mandiri dalam penghitungan estimasi potensi awal;
5. Kerja sama pertukaran data dengan pihak eksternal;
6. Melakukan pengawasan pembayaran masa yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK dan pengiriman klarifikasi atas penurunan pembayaran;
7. Melakukan visit WP yang tidak merespon SP2DK;
8. Melakukan dinamisasi angsuran pasal 25 terutama untuk Wajib Pajak dengan KLU sektor-sektor yang tumbuh;
9. Melakukan kegiatan penyisiran, pendataan dan pengawasan wilayah pusat perekonomian dan perbatasan dengan KPP lainnya;
10. Melakukan pengawasan pembayaran masa melalui tabel pengawasan masa;
11. Menerbitkan surat konfirmasi penurunan setoran secara berkesinambungan;

12. Mengadakan sosialisasi dan isi bareng SPT untuk pemberi kerja;
13. Berkoordinasi dengan Kantor Kelurahan untuk kepatuhan SPT Tahunan bagi WP tahun pajak 2024;
14. Menghubungi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan, dan mengirim WA/SMS blast ke WP sasaran;
15. Fokus kepada WP Karyawan, terutama yang tahun-tahun sebelumnya lapor SPT;
16. Membuat database Contact Person para WP strategis agar lebih mudah menghubungi dalam hal penyampaian SPT Tahunan PPh;
17. Melaksanakan percepatan penyelesaian P4DK;
18. Melaksanakan kegiatan penyuluhan secara aktif dan pasif secara konsisten;
19. Membuat lebih banyak informasi infografis menarik melalui media sosial kantor;
20. Membuat konten untuk menciptakan kepercayaan di lingkungan Wajib Pajak terhadap pajak;
21. Giat mencari mitra penyuluhan dengan satker-satker yang ada dalam lingkungan KPP Pratama Bandung Bojonagara;
22. Menindaklanjuti semua data pemicu tahun Pajak 2024;
23. Menindaklanjuti DPP yang belum selesai dengan melakukan visit dan undangan konseling;
24. Mendahulukan close LHP2DK yang bisa segera diclose;
25. Membuat laporan komite kepatuhan tepat waktu;
26. Melakukan tindakan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan secara akurat dan tepat waktu;
27. Mempersiapkan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan dengan baik dan tepat waktu;
28. Disamping melakukan pengawasan atas Hasil Putusan Penghapusan Sanksi oleh Kanwil untuk ditindaklanjuti oleh JSPN, juga mempercepat penyelesaian tindakan penagihan aktif;
29. Mengoptimalkan pembahasan dalam penyusunan DSPP agar dapat menyediakan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas;
30. Mengoptimalkan penyelesaian pelaksanaan Surat Paksa; Penyitaan, dan segera melaksanakan kegiatan blokir atas rekening WP, dan Usul Cegah;
31. Menerbitkan bukti permulaan tidak menunggu akhir triwulan atau akhir tahun;
32. Menjalin hubungan baik dengan ILAP;
33. Menginventarisir dan mengusulkan pegawai yang akan naik peringkat dan jabatan;

34. Melakukan pengecekan daftar nominatif atas pemenuhan persyaratan kenaikan jenjang dan jabatan pejabat fungsional;
35. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian kenaikan peringkat dan jabatan serta Assessment Center;
36. Melakukan uji coba jaringan dan perangkat 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan ujian/assessment;
37. Melaksanakan mitigasi risiko dengan akurat dan tepat waktu;
38. Melaksanakan pengawasan kinerja dengan akurat dan tepat waktu;
39. Melakukan koordinasi dengan seksi terkait, untuk percepatan pencairan anggaran;
40. Memastikan data yang akan diinput, terutama data baru, sudah sesuai dengan data sebenarnya;
41. Melakukan revisi DIPA secara periodik, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan stakeholder;
42. Berkoordinasi dengan kantor wilayah dalam mencari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.

B. Realisasi Anggaran

Sebagai bagian dari komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, KPP Pratama Bandung Bojonagara telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan strategis organisasi. Penggunaan anggaran ini diarahkan untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, penguatan sistem perpajakan, serta peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak.

Realisasi anggaran yang telah digunakan mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya dalam rangka mewujudkan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra DJP 2020-2024 dan selaras dengan isu tematik APBN 2024. Adapun realiasi anggaran telah terlaksana dan terserap dengan baik dapat ditinjau dari nilai capaian IKU dibawah ini.

**LAPORAN CAPAIAN IKU
PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
KANWIL DJP JAWA BARAT I
KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

A. Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV

Indikator IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian Triwulan IV
A.	Nilai IKPA	96,92
1	Revisi DIPA	100,00
2	Deviasi Hal III DIPA	93,05
3	Penyerapan Anggaran	92,91
4	Belanja Kontraktual	0,00
5	Penyelesaian Tagihan	0,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	99,94
7	Dispensasi SPM	0,00
8	Capaian Output	100,00
B.	Nilai SMART (hanya untuk tahunan)	100,00
	IKU IKKPA Triwulan IV	96,92
	Nilai Capaian IKU IKKPA Triwulan IV	120,00

Dalam mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran, KPP Pratama Bandung Bojonagara menerapkan mekanisme pemantauan dan penyesuaian strategi agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak yang maksimal terhadap pencapaian target kinerja. Beberapa evaluasi utama yang dilakukan meliputi:

1. Penilaian atas efektivitas program yang dibiayai dari anggaran yang telah direalisasikan;
2. Analisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta upaya perbaikan ke depan;
3. Penyusunan strategi optimalisasi anggaran di sisa tahun anggaran, dengan fokus pada kegiatan yang berdampak besar terhadap target penerimaan.

Melalui pemantauan yang ketat terhadap realisasi anggaran, KPP Pratama Bandung Bojonagara memastikan bahwa seluruh alokasi anggaran telah digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prioritas strategis organisasi.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan optimalisasi kinerja organisasi, KPP Pratama Bandung Bojonagara telah melakukan berbagai langkah efisiensi dalam penggunaan sumber daya sepanjang tahun 2024. Efisiensi ini tidak hanya berfokus pada aspek anggaran, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia (SDM), struktur organisasi, pemanfaatan aset, serta penerapan teknologi informasi.

Langkah-langkah efisiensi ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan sumber daya yang efektif untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi secara berkelanjutan. Berikut adalah uraian mengenai efisiensi yang telah dilakukan di berbagai bidang:

1. Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Mengurangi pengeluaran non-prioritas, seperti perjalanan dinas dan kegiatan sosialisasi yang dapat dialihkan ke platform digital;
- b. Menerapkan mekanisme monitoring anggaran berbasis realisasi kebutuhan, sehingga alokasi dana lebih terfokus pada program yang memberikan dampak signifikan terhadap kinerja organisasi;
- c. Meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa melalui digitalisasi sistem administrasi, sehingga mengurangi biaya administrasi dan pengelolaan logistik;
- d. Peningkatan efisiensi belanja operasional dengan mengadopsi model shared services untuk beberapa kebutuhan lintas seksi.

2. Efisiensi dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Implementasi job rotation dan job enrichment, yang memungkinkan pegawai mengembangkan kompetensi lintas fungsi tanpa perlu perekrutan tambahan;
- b. Penggunaan sistem e-Learning dan webinar internal untuk program pelatihan pegawai guna menghemat biaya pelatihan tatap muka tanpa mengurangi efektivitas pembelajaran;
- c. Memanfaatkan teknologi otomatisasi untuk tugas administratif sehingga pegawai dapat lebih fokus pada tugas strategis seperti pengawasan dan pelayanan wajib pajak;
- d. Redistribusi pegawai ke bidang-bidang yang memiliki kebutuhan lebih tinggi guna meningkatkan produktivitas tanpa menambah jumlah SDM baru.

3. Efisiensi dalam Struktur Organisasi

Efisiensi dalam struktur organisasi dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Reorganisasi internal dengan mengurangi tumpang tindih fungsi antara subbagian untuk mempercepat pengambilan keputusan dan penyelesaian pekerjaan;
 - b. Peningkatan fasilitas kantor demi kenyamanan pegawai dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari;
 - c. Meningkatkan efisiensi dalam proses audit dan pemeriksaan pajak dengan memanfaatkan analitik data yang lebih akurat sehingga meminimalkan intervensi manual;
 - d. Mengadopsi pendekatan Risk-Based Approach (RBA) dalam pengelolaan kepatuhan perpajakan untuk mengurangi kebutuhan sumber daya dalam pengawasan manual yang bersifat repetitif.
4. Efisiensi dalam Pemanfaatan Aset dan Infrastruktur
- Efisiensi dalam pemanfaatan aset dan infrastruktur dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
- a. Menerapkan sistem pemeliharaan aset berbasis kebutuhan, dengan monitoring yang lebih ketat terhadap pemakaian listrik, air, dan sarana kerja lainnya guna mengurangi pemborosan;
 - b. Mengurangi penggunaan kendaraan dinas untuk perjalanan yang dapat digantikan dengan pertemuan virtual atau layanan digital;
 - c. Optimalisasi sistem manajemen pemeliharaan kendaraan dinas agar lebih hemat biaya dengan perawatan yang berbasis prediksi kebutuhan;
 - d. Menyusun ulang strategi pemanfaatan ruang kerja untuk mendukung model kerja fleksibel dan nyaman.
5. Efisiensi dalam Penggunaan Teknologi Informasi
- Efisiensi dalam penggunaan teknologi informasi dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
- a. Optimalisasi sistem layanan elektronik, seperti e-Registration, e-Filing, e-Faktur, dan e-Bupot, guna mengurangi penggunaan dokumen fisik dan biaya administrasi;
 - b. Pemanfaatan *cloud computing* dan *cloud storage* untuk menyederhanakan infrastruktur teknologi informasi dan mengurangi ketergantungan pada sistem berbasis server atau hard disk fisik;

- c. Pemanfaatan otomatisasi proses bisnis melalui *robotic process automation* (RPA) untuk tugas administrasi pajak yang berulang, sehingga mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual.

D. Kinerja Lain-Lain

Sampai pada saat penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Bandung Bojonagara Tahun 2024, belum ada kegiatan penghargaan yang diadakan sehingga belum dapat diuraikan terkait *achievement* maupun penghargaan yang didapat. Akan tetapi, KPP Pratama Bandung Bojonagara berhasil menjadi KPP pertama yang menorehkan realisasi penerimaan 100% pada Kanwil DJP Jawa Barat I. Hal ini membuat kebanggaan tersendiri dan motivasi untuk tetap berkembang dan semangat dalam melaksanakan tugas-tugas maupun target yang didapat pada tahun yang akan datang.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi telah dilaksanakan pada DKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Bandung Bojonagara yang dihadiri oleh seluruh pegawai. Dalam kesempatan ini, Bapak Tb. Sofiuddin selaku Kepala Kantor KPP Pratama Bandung Bojonagara menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada segenap keluarga besar KPP Pratama Bandung Bojonagara atas segala kinerja dan jerih payah yang telah dilakukan selama tahun 2024. Beliau juga menyampaikan untuk tetap semangat dan tidak kendor dalam menyongsong tantangan-tantangan kedepan.

Beliau juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa nilai IKU yang masih bisa ditingkatkan lagi pada Tahun 2025. Diharapkan nantinya segenap pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara dapat saling bahu membahu dalam mewujudkan peningkatan kinerja ini sehingga semuanya dapat berdampak positif baik untuk kantor maupun institusi secara keseluruhan. Hasil yang baik bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang harus terus diperbaiki demi terciptanya perbaikan dan peningkatan yang berkesinambungan.

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja KPP Pratama Bandung Bojonagara pada tahun 2024 terbilang sangat memuaskan. Dalam hal ini, dapat dilihat dari sasaran strategis yang ditentukan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Tahunan 2024 dengan rata-rata persentase nilai kinerja kantor sebesar 109,50 persen.

Untuk mempertahankan dan bahkan untuk lebih meningkatkan pencapaian pada tahun 2025, KPP Pratama Bandung Bojonagara akan terus melakukan langkah-langkah antisipatif. Langkah-langkah antisipatif tersebut dapat diterapkan pada beberapa segi, diantaranya adalah:

1. Sumber Daya Manusia.

KPP Pratama Bandung Bojonagara akan terus berusaha meningkatkan kualitas para pegawainya dalam memberikan kontribusi terbaik terhadap kinerja KPP Pratama Bandung Bojonagara. Untuk meningkatkan kemampuan baik *softskill* maupun *hardskill*, beberapa hal yang akan dilakukan di KPP Pratama Bandung Bojonagara antara lain:

- a. Diklat

KPP Pratama Bandung Bojonagara akan selalu mengirimkan pegawai-pegawainya untuk mengikuti diklat yang bertujuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan, meningkatkan kompetensi, dan meningkatkan keterampilan. Pegawai-pegawai yang mengikuti diklat diberikan tanggung jawab untuk membagi pengetahuan kepada pegawai-pegawai lain (*transfer of knowledge*) melalui kegiatan *In House Training* yang dilaksanakan di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

- b. *In House Training*

Perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan menuntut para pegawai untuk selalu meningkatkan kemampuan secara berkesinambungan. Untuk memfasilitasi hal tersebut, KPP Pratama Bandung Bojonagara akan secara rutin melaksanakan Kegiatan *In House Training*.

- c. Rapat Pembinaan dan Forum *Account Representative*

Dalam menyatukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan bersama, dilaksanakan rapat pembinaan yang diikuti oleh seluruh pegawai dan dipimpin oleh Kepala Kantor. Rapat Pembinaan menjadi sarana bagi para pegawai

untuk menyampaikan masukan, kritik, dan saran demi kelancaran kinerja organisasi. *Forum Account Representative* adalah forum yang anggotanya adalah para *Account Representative* sebagai wadah koordinasi dalam menyamakan persepsi, melaksanakan pekerjaan, serta keseragaman dalam memperlakukan Wajib Pajak.

d. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan secara berkala

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penerimaan kantor yang optimal diperlukan evaluasi secara berkala.

2. Peningkatan Program Kantor

a. Penerimaan SPT Tahunan.

Untuk memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak khususnya penerimaan SPT Tahunan, KPP Pratama Bandung Bojonagara akan meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas serta sarana dan prasarana, membentuk tim Satuan Tugas yang terdiri dari seluruh pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara untuk memberikan layanan dalam percepatan penerimaan SPT Tahunan 2025 dengan melakukan pemberian asistensi secara daring maupun luring kepada Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunan.

b. Melakukan Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak, KPP Pratama Bandung Bojonagara akan terus meningkatkan sarana dan prasarana untuk kenyamanan Wajib Pajak. Di tahun 2025, peningkatan sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah dengan, pemasangan banner dan spanduk yang berisi informasi perpajakan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi persyaratan administratif perpajakan, dan lebih mengintensifkan penyebaran informasi yang dibutuhkan Wajib Pajak melalui media sosial.

c. Penyuluhan Perpajakan.

KPP Pratama Bandung Bojonagara akan senantiasa membantu para Wajib Pajak dalam memahami ketentuan, peraturan, dan aplikasi perpajakan baru dengan melakukan kegiatan penyuluhan perpajakan. Kegiatan penyuluhan akan dilakukan baik secara langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan maupun secara daring dengan memanfaatkan aplikasi *video conference*. Kegiatan tersebut nantinya tidak hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang sudah terdaftar

tetapi juga kepada kalangan mahasiswa, pegawai pada instansi tertentu untuk menciptakan masyarakat yang paham pajak.

d. *Law Enforcement.*

KPP Pratama Bandung Bojonagara ditahun 2025 mendatang akan selalu berupaya mencairkan tunggakan-tunggakan pajak dengan melalui tindakan Penagihan Aktif dan Pemeriksaan Wajib Pajak Potensial dengan memanfaatkan aplikasi *Compliance Risk Management (CRM)*.

e. Penggalian Potensi bersama instansi lain.

Penggalian potensi bisa dilakukan secara maksimal apabila tersedia data yang memadai. Oleh karena itu, *joint analysis* dengan instansi lain seperti Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Pendapatan di daerah perlu dilakukan agar penggalian potensi menjadi akurat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Bandung Bojonagara Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Bandung Bojonagara sehingga dapat menjadi umpan balik untuk peningkatan kinerja dan dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut pada periode berikutnya.